



Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

Fidrian Pangemanan¹, Johny Lumolos, Fanley Pangemanan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi
Corresponding author e-mail: ianbots171@gmail.com¹

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi organisasi kepemudaan dalam pengawasan pembangun Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Teori Oakley. Dalam penelitian ini ada 10 informan yang terdiri dari satu orang kepala desa, satu sekretaris desa, dua anggota badan pemberdayaan desa, tiga pemuda dan tiga anggota masyarakat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga macam makna partisipasi. Yaitu: (1) Partisipasi sebagai kontribusi harus adanya keikutsertaan pemuda dalam mengambil bagian dalam pembangunan desa. (2) Partisipasi sebagai organisasi dalam organisasi kepemudaan pemuda diharuskan mengambil bagian dalam bagian keikutsertaan pembangunan secara tidak langsung para pemuda bisa langsung mengawasi apa yang dikerjakan dalam pembangunan desa. (3) Partisipasi sebagai pemberdayaan dalam upaya pembangunan desa. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu elemen yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya menyukseskan program pembangunan. Artinya, dengan partisipasi masyarakat menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan mereka yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Kata Kunci: *Partisipasi; Organisasi Kepemudaan; Pengawasan Pembangunan*

Pendahuluan

Pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi masyarakat dalam perencanaan pengawasan pelaksanaan

maupun evaluasi agar pembangunan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu dilakukan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menagani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa yang terjadi. Jadi pada akhirnya masyarakat bukanlah obyek yang hanya sebagai penerima program pembangunan melainkan masyarakat sebagai subyek yang melakukan pembangunan itu sendiri.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan karena merupakan tahap awal dan dan dasar dari proses pembangunan. Perencanaan memuat berbagai hal tentang apa yang akan dan harus dilaksanakan di masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan berhasil. Perencanaan juga termasuk di dalamnya penganggaran yaitu suatu proses pengalokasian dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari pembangunan (Sampe 2015).

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan bangsa karena penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di desa lebih banyak dari pada bertempat tinggal di kota. Menurut Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 menyatakan sebagai berikut : Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan megurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa desa juga mempunyai otonomi untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut menandakan bahwa Desa diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga dengan Desa. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 79 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan kabupaten/kota. Dengan kata lain, perencanaan pembangunana Desa harus berpedoman pada perencanaan pembangunan pusat. Sedangkan perencanaan pembangunan di tingkat bawah berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan pembangunan ditingkat pusat.

Dalam meraih tujuan-tujuan pembangunan organisasi kepemudaan dilibatkan karena tidak lepas juga dari pemikiran orang-orang muda yang bisa di pakai untuk membangun.

Mereka selalu siap untuk berbuat atau bekerja, peran ini nampak apabila struktur ekonomi dan masyarakat Desa berubah, seperti halnya menyediakan infrastruktur sosial, menjadi bagian dari strategi dan program pembangunan. Hal ini melibatkan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan Desa untuk menyediakan infrastruktur sosial. Kemudian dalam penjelasan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yakni lembaga kemasyarakatan desa, di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu disetiap perencanaan pembangunan di desa harus melalui forum musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrenbang. Musrenbang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (stakeholders) desa yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa. Musyawarah ini penting untuk menyusun dan mengorganisir seluruh sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lauma, Pangemanan, Sampe 2019). Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tak terkecuali pemuda.

Penyertaan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan Desa sangatlah perlu karena sebagian yang berkesinambungan dengan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah suatu keharusan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti pemuda diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksana hingga evaluasi dalam setiap tahap pengawasan pembangunan yang di programkan.

Pemuda adalah kaum muda yang harus dilihat sebagai pribadi yang sedang berada pada taraf tertentu dalam perkembangan hidup seseorang manusia, dengan kualitas dan ciri tertentu yang khas, dengan hak dan peran serta kewajiban tertentu dengan potensi dan kebutuhan tertentu pula.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Pembangunan merupakan suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas dalam kerangka keberlangsungan hidup pembangunan sebenarnya

dibagi menjadi dua yaitu pertama masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, kedua masalah manusia yang yang menjadi pengambil inisiatif. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditunjukkan pada pembangunan manusia. Manusia yang kreatif harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pemuda selaku pelaku sejarah mulai mengetahui akan pentingnya organisasi sebagai alat untuk saluran pengawasan pembangunan. Semua aktifitas organisasi umumnya melibatkan bagian kepemudaan, baik dalam penyaluran bakat, kreatifitas, inovasi dan minat. Dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa membuat pemuda di Desa Lompad ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Desa. Hal ini di tandai dengan berdirinya organisasi kepemudaan sebagai wujud eksistensi dan salah satu wadah menjadi perwakilan dari pemuda itu sendiri. Adapun organisasi pemuda yang ada di Desa lompad yaitu karang taruna, pemuda GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa), Pemuda GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia) dan KML (Kerukunan Mahasiswa Lompad). Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial untuk masyarakat khususnya generasi muda, karang taruna yang ada di Desa lompad saat ini setelah di bentuk sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial begitu juga organisasi pemuda GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) dan pemuda GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia) yang merupakan organisasi pemuda Gereja, dimana partisipasi pemuda Gereja dalam pembangunan Gereja dan juga Desa sangat baik ini dilihat dari keikutsertaan pemuda-pemuda Gereja setiap kerja bakti baik itu di Gereja ataupun di Desa, serta KML yang sampai saat ini masih aktif dan memberikan partisipasi baik dalam pembangunan fisik, rohani maupun dalam pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari beberapa organisasi yang ada mengenai partisipasi dalam pembangunan di Desa Lompad organisasi kepemudaan yang ada belum berpartisipasi secara signifikan di mana partisipasi yang diberikan masih berupa partisipasi secara fisik ini di karenakan pemerintah Desa Lompad tidak mengikut sertakan para pemuda dalam perencanaan maupun peancangan kegiatan pembangunan Desa.

Oleh karena itu di Desa Lompad masih menunjukkan minimnya kesempatan dan peluang-peluang yang dimiliki oleh pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Posisi pemuda msih diletakan sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek/pelaku pembangunan. Hal ini diantaranya disebabkan minimnya komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh pemuda tentang tahapan dan proses pembangunan. Selain itu pihak penyelenggara pemerintah masih belum memberikan kepercayaan untuk melibatkan pemuda. Pemuda masih dianggap sebagai sumber masalah, bukannya sebagai potensi dan modal utama pembangunan.

Partisipasi pada hakekatnya menyangkut setiap mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai warga Negara dan warga masyarakat, namun demikian sikap dan

perilaku yang bagaimana dapat kita artikan secara sesungguhnya. Partisipasi mempunyai lingkungan dan tingkatnya sendiri-sendiri. Itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya harapan-harapan yang ada mengenai perilaku yang dikehendaki.

Partisipasi dapat bersifat semua bila perilaku yang diperlihatkan bersifat sangat persial bila perilaku yang ditampilkannya hanya sebagai saja dari sesungguhnya diharapkan akan tetapi dapat juga menjadi lengkap bila sesuai atau mendekati yang diharapkan.

Hal mengambil bagian wujud peristiwa psikologi bagi seseorang karena sebagai semangat jiwa yang dilakukan secara sadar untuk turut secara aktif dalam melibatkan diri memberikan sumbangsi-sumbangsi baik moril maupun materil. Untuk memperoleh pengertian partisipasi Peneliti telah menimbah beberapa pendapat sarjana melalui definisinya, seperti menurut Winardi (2009 : 64), mengemukakan bahwa secara formal partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan fungsi-fungsi dalam proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan hal itu.

Dengan demikian seseorang secara individu kalau diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut, maka ia akan merasa dirinya dihargai serta diperlukan dalam segala hal, terutama dalam proses pembuatan keputusan, penentuan dan pembuatan suatu rencana pembangunan, sehingga hal ini pula akan menjadi motivasi bagi seseorang untuk melibatkan diri dari mengambil diri dalam mengambil bagian dari kegiatan pembangunan.

Dari definisi tersebut ada tiga hal yang ditekankan oleh talisiduhu, jika diterapkan dibidang pembangunan yakni :

- 1, Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional kehadiran secara fisik atau pribadi semata-mata didalam suatu kelompok tanpa keterlibatan mental tersebut tidaklah cukup.
2. Kesiediaan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan
3. Kesiediaan yang timbul untuk bertanggung jawab yang timbul.

Oakley (2010:14) berpendapat bahwa partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat.

Kata organisasi mempunyai 2 pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit,

perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien (Handoko 2011:167). Menurut James A. F. Stoner (2012:6), organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang struktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; Pengambilan sumberdaya manusia dalam masyarakat sebagai anggota – anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikan remaja gereja, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya (Warastuti 2009). Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau komunitas adat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja program pemerintah yang berkuasa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pengawasan pembangunan Desa Lompad Kec. Ranoyapo kabupaten minahasa selatan. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait

fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi organisasi kepemudaan dalam pengawasan pembangunan Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Oakley (2010) yaitu :

1. Partisipasi sebagai kontribusi
2. Partisipasi sebagai organisasi
3. Partisipasi sebagai pemberdaya

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota Badan Perwakilan Desa, Pemuda, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan diperoleh berdasarkan sumbernya yaitu tempat, pelaku dan kegiatan yang dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Husaini Usman (2009:83).

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hal Partisipasi pemuda dalam pengawasan pembangunan Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

Hasil dan Analisis

Dalam bab ini akan dilakukan analisis data terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun analisis yang dilakukan adalah dengan menggambarkan kondisi

yang terjadi dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi tersebut sesuai dengan fokus kegiatan penelitian. Informan merupakan objek yang saling mendukung untuk dapat menggambarkan bagaimana partisipasi organisasi kepemudaan dalam pengawasan pembangunan di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, untuk itu dari keterangan informan ini diperoleh data dan informasi mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Maka dalam hal ini pendapat atau informasi dari masyarakat juga diperlukan sebagai penggambaran apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo.

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan utama yang penulis lakukan. Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan informan kunci, informan utama dan informan biasa untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan penelitian. Ketiga, melakukan observasi (pengamatan) sehubungan dengan permasalahan penelitian. Dan hasil wawancara ini merupakan bagian dari fokus penelitian yaitu: Partisipasi sebagai kontribusi, partisipasi sebagai organisasi dan partisipasi sebagai pemberdaya.

Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya dalam mendukung implementasi Undang-undang Desa, dimana perlu melibatkan semua unsur kelompok masyarakat desa, salah satunya adalah organisasi kepemudaan. Dalam hal pembangunan sampai pada pengawasan pembangunan tersebut merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses berdesa sebagai wujud dari pengakuan atas rekognisi dan subsidiaritas desa dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti merangkum hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai partisipasi organisasi kepemudaan dalam pengawasan pembangunan di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo.

Keikutsertaan organisasi khususnya organisasi pemuda dalam pembangunan desa merupakan hal yang harus dilakukan oleh para pemuda saat ini karena keikutsertaan pemuda dalam pembangunan secara tidak langsung para pemuda bisa langsung mengawasi apa yang dikerjakan dalam pembangunan desa.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi kepemudaan yang ada di Desa Lompad telah berkontribusi dengan selalu ikut dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi sebagai organisasi telah berjalan baik dengan selalu ikut ambil andil dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa Lompad. Akan tetapi dalam menghadiri musyawarah desa para pemuda hanya beberapa yang ikut hadir. Partisipasi

sebagai pemberdaya juga telah menunjukkan kepedulian organisasi kepemudaan dalam pembangunan khususnya pembangunan kemasyarakatan.

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bahwa aparat desa hendaknya lebih memberi ruang kepada pemuda agar bukan hanya ikut dalam pelaksanaan pembangunan tetapi dalam perencanaannya juga diberi kesempatan untuk mendengarkan usulan dari pemuda. Pemerintah Desa hendaknya juga mensosialisasikan programnya kepada seluruh warga masyarakat termasuk kepada pemuda, dan dapat berkoordinasi dengan baik bersama dalam menampung seluruh ide atau gagasan yang diberikan oleh masyarakat. Sebagai asset berharga tentunya aparat desa harus lebih baik dalam memanageri organisasi pemuda dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa secara maksimal agar pembangunan dapat segera terealisasi sebagaimana rencana.

Referensi

- Conyers, Diana (2011). *An Introduction to Social Planing in The Third World*, terjemahan. Jhon wiley & Sons Ltd. 1994.
- Danim, Korten (2010). *Pembangunan Desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko, T. Hani (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri (2002). *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Kartasasmita, Ginanjar (2007). *Pembangunan untuk Rakyat: memaduhkan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: CIDEAS.
- Kuncoro, Mudrajad (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lauma, R., Pangemanan, S., Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik: suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Eksekutif*, vol. 3, no. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855/23504>.
- Mockler, Rober J. (2013). *The Management Control Process*, dialihbahasakan oleh Handoko. Englewood Clifs: Prentice Hal.
- Nawawi, Hadari (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Ndrah, Talisuduhu (2009). *Pembangunan Masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Jakarta PT. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif (2012). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Oakley, A. (2010). *Analisa Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksara.
- Sampe, S. (2015). Expenditure Restraint in Government Budgets in Australian Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11390/10979>.
- Santoso, Slamet (2010). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sastropoerto, Santoso R. A. (2010). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumi.
- Siagian, Sondang P. (2009). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stoner, James A.F.; Freeman, R. Edward; Gilbert, Daniel R. (2012). *Manajemen, edisi Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Supriatna, Tjhaya (2010). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryono, Agus (2010). *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Winardi, J. (2009). *Manajemen Perubahan (The Management of Change), cetakan pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Wrihatnolo, Randy R.; Nugroho D., Riant (2009). *Manajemen Pembangunan Indonesia: sebuah pengantar panduan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wresniwiro (2012). *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.

Sumber Lain-Lain :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa.